

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN
SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA**

TESIS

Diajukan

**Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 2
Magister Hukum Konsentrasi Profesi Advokat**



Oleh :

Nidyana Dwi Deviani, SH

05.93.0154

PERBUATAN

NO. IN : 021 / Sa / MPA / CI

TGL : 13/04 '12

PARAF : Wf

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : NIDYANA DWI DEVIANI
Nim : 05.93.0154
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Bidang Konsentrasi : HUKUM PROFESI ADVOKAT

JUDUL TESIS :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM
PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
PENGUASA



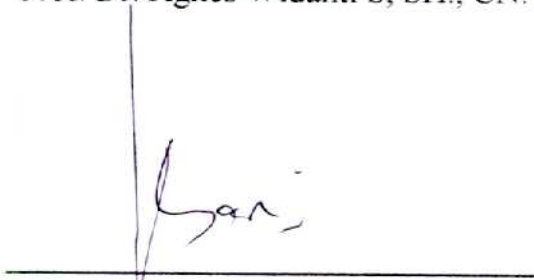
Disetujui Oleh :

Pembimbing :



Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN.

Tgl :



V. Hadiyono, SH., M.Hum.

Tgl :



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

PROGRAM MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI PROFESI ADVOKAT
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : NIDYANA DWI DEVIANI

Nim : 05.93.0154

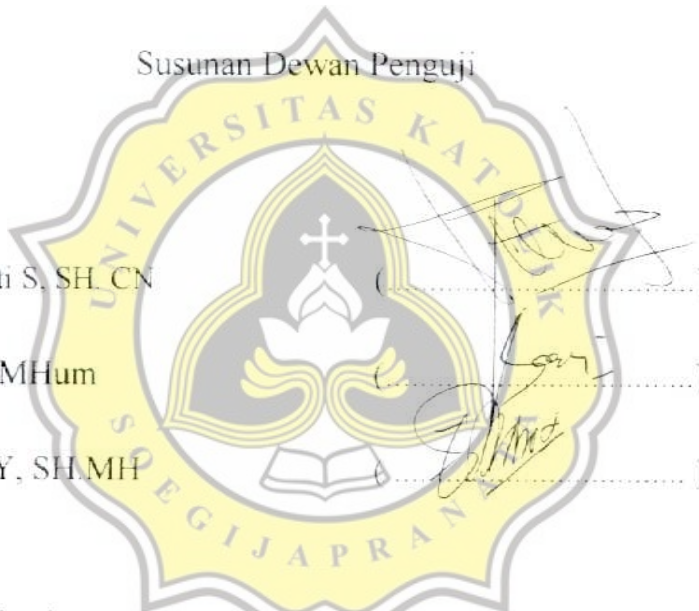
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 3 November 2007

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN
2. V.Hadiyono, SH.,MHum
3. Endang Wahyati Y, SH,MH



Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kosentrasi Profesi Advokat.



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya,

Nidyana Dwi Deviani, SH



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan berkat dan rahmat-Nya, Tesis yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA** dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tersusun bukan atas usaha penulis sendiri, tetapi karena bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Pada kesempatan ini secara tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Y. Bagus Wismanto, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Rudyanto Susilo, Direktur Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN, selaku Ketua Program Magister Hukum.
4. Bapak Budi Sarwo, SH., M. Hum yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk menempuh Pendidikan Magister Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak V. Hadiyono, SH., M. Hum dan Bapak Agus Wahyu Rahardi, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya guna membimbing penulisan Tesis ini hingga selesai.

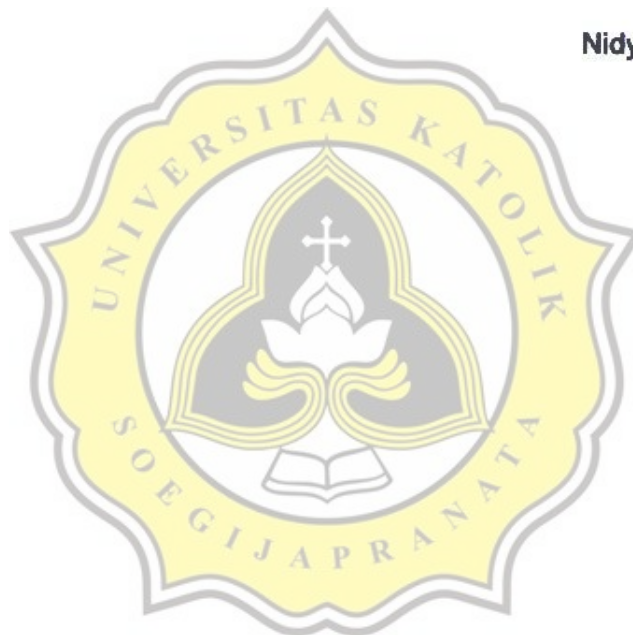
6. Bapak Val. Suroto, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang banyak membantu memberikan dorongan dan masukan hingga penulisan Tesis ini selesai.
7. Ibu Endang Wahyati Y. SH. MH selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan terhadap penulisan tesis ini.
8. Ibu Fitriamina, SH Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menjadi sumber informasi, yang telah membantu penelitian untuk penulisan Tesis ini.
9. Kekasih tercinta Klaus Romana, SH yang selalu senantiasa memberikan doa, cinta kasih, kesabaran dan perhatian yang tulus dalam mendampingi penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Keluarga besar terkasih (mama, Ci Lydia, Uci, Feby dan Maika) yang selalu mendoakan dan mendorong tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
11. Teman-Teman setia M'ba Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv, M'ba Bhein Arini. Y, SH., MH.Adv dan Ko Budi Utomo, SH., MH. Adv yang selalu memberikan semangat, masukan dan kritik dalam keberhasilan penulisan Tesis ini.
12. Staf Pengajaran Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata (Mas Sabar) dan staf Pengajaran Magister Profesi Advokat (Mba Pudji dan Mas Patria) terima kasih atas dukungannya.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan turut sertanya, sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan lancar dan baik.

Sebagai hasil karya manusia, Tesis ini tentunya ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya masukan dari semua pihak untuk penyempumaannya.

Semarang, November 2007

Penulis

Nidyana Dwi Deviani



ABSTRAK

Terjadinya sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat, dikarenakan aparat pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa atau lebih tinggi dibandingkan dengan warga masyarakat. Akibat dari dikeluarkannya keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menyebabkan seseorang atau badan hukum perdata mengalami kerugian, karena aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan tindakan secara sepihak, melampaui batas-batas kewenangannya, tidak mengikuti dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta melawan hukum, ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya pemerintah memerlukan kebebasan untuk dapat bertindak, sehingga kadangkala dalam penyelenggaraan pemerintahan warga masyarakat diabaikan kepentingannya. Hal ini disebabkan luasnya campur tangan pemerintah terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh penguasa, maka individu atau badan hukum perdata dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingannya tersebut, hakim dapat menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang tertuang dalam putusan terutama pada bab mengenai pertimbangan tentang hukumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum yang dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan untuk sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan perlunya suatu pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Obyek penelitian berupa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan-putusan tentang sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, berjumlah 15 (lima belas) putusan. Putusan dipilih yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu perkara-perkara Tata Usaha Negara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau Badan Hukum Perdata. Untuk menyusun kesimpulan, data yang diperoleh dianalisis secara normatif-kualitatif.

Dari hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut: Hakim Tata Usaha Negara telah mempertimbangkan sengketa yang dilakukan penguasa dari sisi yuridis, filosofis dan sosiologis, namun kadangkala hakim mempertimbangkan suatu perkara dari sisi politis yang merugikan kepentingan pencari keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum menganalisis secara mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa seperti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Agustus 1991 No. 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT.

Pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan, diperlukan untuk mengetahui uraian mengenai penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan, baik yang diterima oleh para pihak maupun yang dibantah, pengetahuan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara, teori-teori hukum yang mana ini menjadi keseluruhan dari inti putusan yang menunjukkan gugatan Penggugat terbukti kebenarannya atau sebaliknya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

ABSTRAC

The verdict between organization or administrative official with society community, because administrative official have been extraordinary position or high position in comparison with society community. The consequence from the letter of decision by organization or administrative official cause personal or civil law organization have been detriment, because administrative official in carrying out of job measure unilaterally, pass by limit's authority, not followed and be faithful the government correct general principle's and againt's of law, this is because on carrying out of job government need freedom to measure and sometimes in administration implementation society community ignored they importance, that;s all because width of involved with whole aspect society community existence. The consequence from action of rulers, personal or civil law organization can protest to legal remedy in Government Administrative Court of Justice then with accusation by litigant, judge;s can determine there is or no there is conducted againt;s of law by rulers that those in decision first on chapter about legal judge's consideration to decide for verdict againt's of law conducted by rulers and legal judge's consideration needed in judge's consideration.

The research by using normative juridical approach, the utilized data is secondary data and primary data. The data collecting instrument is documentary study. The object of the research or the legal judge's consideration in the decisions about the verdict againt's of law conducted by rulers, are the 15 sentences from first judicature until judicial review. The sentences with special characteristic are chosen such as administrative cases about the verdict againt's of law conducted by rulers, that those maked personal or civil law organization have been detriment. To arrange conclusion, the data is analized normatively and qualitatively.

From the result of analizing, can be know that administrative judge's have been considered the verdict againt's of law conducted by rulers from law side, phylosofy side and sociology side, but sometimes the judge's consideration on political side that those make litigant detriment. The administrative judge's on decision not analized so far about the verdict againt's of law conducted by rulers ths can see on administrative decision on Jakarta, August, 21 1991 No. 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT.

Judge's law consideration that those in decision, be needed for to understand analysis about assessor side fact of law that those forward a long court session, accepted by collective parties although disagreement, judge's knowledge and certain to decide a conflict, law of theory on the whole from decision of contents that those point out accusation by litigant proved correct or on the contrary.

Key words : Judge's legal consideration, Goverment Administrative Court of Justice, Againt's of Law by Rulers

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Perbuatan Pemerintah.....	9
B. Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata.....	13
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	19
D. Pertimbangan Hakim.....	23
E. Putusan Hakim.....	24
F. Penemuan Hukum.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Obyek Penelitian.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisa Data.....	40
F. Metode Penyajian Data.....	41
G. Sistematika Penyajian Tesis.....	41

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Untuk Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa.....	43
1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 1991 No. 011/G/1991/Pr/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 November 1991 No. 005/B/1991/Pr./PTUN JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1993 No. 2 K/TUN/1992.....	43
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 September 1991 No. 035/G/1991/Pr/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Maret 1992 No. 04/B/1992 /PT.TUN-JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 No. 11 K/TUN/1992.....	57
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 April 1992 No. 129/G/1991/TK/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Juli 1990 No. 44/B/1992/PT.TUN-JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1994 No. 58 K/TUN/1992;	78

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Februari 1999 No. 097/G.TUN/1998/PTUN.JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 September 1999 No. 90/B/1999/PT.TUN.JKT; Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Januari 2001 No. 35 K/TUN/2000.....	94
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Agustus 1999 No. 032/G.TUN/1999/PTUN-JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Desember 1999 No. 163/B/TUN/1999/PT.TUN.JKT; Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 2001 No. 111 K/TUN/2000;	106
B. Perlunya Suatu Pertimbangan Tentang Hukumnya Yang Dibuat Oleh Hakim Dalam Putusan.....	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	130
Daftar Pustaka.....	132

